

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERILAKU NELAYAN ARTISANAL DALAM PEMANFAATAN SUMBERDAYA PERIKANAN DI PANTAI UTARA PROVINSI JAWA BARAT

Prihandoko^{1*)}, Amri Jahi², Darwis S. Gani², I Gusti Putu Purnaba³, Luky Adrianto⁴, dan Iwan Tjitradjaja¹

1. Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Depok 16424, Indonesia
2. Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia
3. Fakultas Ilmu Matematika dan Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia
4. Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Institut Pertanian Bogor, Bogor 16680, Indonesia

^{*)}E-mail: pri@inrr.org

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan perilaku secara akurat dengan menggunakan perspektif *theory planned behavior* dari nelayan artisanal di Indonesia di tengah kehidupan dengan kondisi degradasi sumberdaya laut yang semakin menurun adanya, kemiskinan absolut yang dihadapi oleh nelayan artisanal, semakin kompleksnya persoalan pemanfaatan sumberdaya pesisir di Indonesia serta semakin beragamnya *stakeholder* pemanfaat sumberdaya tersebut. Teknik penarikan sampel dilakukan dengan cara acak kluster dengan jumlah sampel 400 rumah tangga. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara berdasarkan kuesioner dan diproses dengan menggunakan program structural equation model (SEM) and LISREL 8:54. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa perspektif *theory planned behavior* dapat digunakan untuk melihat niat untuk berperilaku dan perilaku nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat, meskipun dimungkinkan adanya perilaku yang dilakukan tanpa melalui niat untuk berperilaku. Koefisien determinasi antara variabel sikap, norma subjektif, keyakinan kemampuan berperilaku terhadap variabel niat untuk berperilaku sebesar 0,40. Kondisi ini mengindikasikan adanya faktor variabel lain sebesar 60% di luar variabel penelitian ini yang mempengaruhi niat untuk berperilaku. Sementara itu pengaruh variabel niat untuk berperilaku terhadap perilaku sebesar 0,51 mengindikasikan bahwa tidak sepenuhnya niat untuk berperilaku nelayan terwujud sesuai dengan perilaku mereka dalam kegiatan perikanan tangkap. Temuan penelitian ini yang menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku nelayan artisanal dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan dapat memberikan kontribusi terhadap kegiatan ko-manajemen perikanan di Indonesia, khususnya pada komunitas di wilayah studi di pantai utara Provinsi Jawa Barat.

Influencing Behavior of Artisanal Fisherman in Utilizing Fishery Resources in the North Coast of West Java Province

Abstract

This study aims to estimate accurately the behavior using the Theory of Planned Behavior perspective of artisanal fishermen in Indonesia, in the midst of life with the condition of degradation of marine resources are declining, absolute poverty faced by artisanal fishermen and the more complex issues of coastal resource use in Indonesia with a more diversity of stakeholders utilizing these resources. The population of artisanal fishermen in the northern coast of West Java Province 10,404. Techniques for sampling by cluster random sampling clusters with the number of household sample of 400 artisanal fishermen. Data was collected using a questionnaire interview further processed using the program structural equation model (SEM) and LISREL 8:54. The conclusion of this study were (1) Theory of planned behavior perspective can be used to view the intention to behave and conduct artisanal fishermen in the northern coast of West Java province, despite the possible existence of behavior that is done without the intention to behave (2) the coefficient of determination between the attitude variables, subjective norm, perceived behavior control to variable behavior intention at 0.40. These conditions indicate the existence of other variable factors of 60% outside variables that affect the intention of this study to behave. Meanwhile the influence of variables on behavior intention to behave by

0.51 indicates that it is not fully manifested the intention to behave in accordance with the behavior of fishermen in their fishing activities, (3) that explains the study's findings about the factors that influence the behavior of artisanal fishermen in the utilization fishery resources, can contribute to the activities of co-management of fisheries in Indonesia, especially in communities in the study area on the northern coast of West Java Province.

Keywords: artisanal fishermen behavior, behavior intention, attitude, subjective norm, perceived behavior control

1. Pendahuluan

Memperkirakan perilaku secara akurat dengan menggunakan perspektif *theory planned behavior* (teori perilaku yang direncanakan) dari nelayan artisanal di Indonesia, khususnya di pantai utara Provinsi Jawa Barat penting untuk dikaji. Urgensi ini diperkuat dengan kehidupan nelayan Indonesia yang berbeda di tengah kondisi degradasi sumberdaya laut yang semakin menurun, kondisi kemiskinan absolut dan semakin kompleksnya persoalan pemanfaatan sumberdaya pesisir di Indonesia dengan semakin beragamnya *stakeholder* pemanfaat sumberdaya tersebut.

Kajian teoritis yang menjelaskan bagaimana dampak sikap terhadap perilaku individu telah dibahas sejak tahun 1862. Dalam kurun waktu tahun 1918 hingga 1925, para ahli psikologi sosial telah memunculkan berbagai teori yang menghubungkan antara sikap dengan perilaku. Tesis utama dari perkembangan perspektif teori tersebut adalah "sikap dapat menjelaskan perilaku individu" Berangkat dari kritik terhadap teori dan pengukuran sikap yang seringkali tidak tepat, yaitu tidak dapat memperkirakan perilaku yang akan timbul, Fishbein (1967) dan Ajzen (Fishbein & Ajzen, 1975) memunculkan pentingnya unsur "niat untuk berperilaku". Menurut Fishbein & Ajzen (1975), mengukur sikap terhadap niat sama dengan mengukur perilaku itu sendiri karena menurut mereka hubungan antara niat dan perilaku adalah yang paling dekat. Perspektif teori yang kemudian dikenal dengan nama Theory Planned Behavior ini selanjutnya digunakan oleh banyak peneliti untuk memperkirakan perilaku (*behavior*) melalui niat untuk berperilaku (*behavior intention*) (Beedell & Rehman (2000), Arifin (1995), Seen (2001), Conner, (2002), Elliot (2003), Carey (2007), Ginis (2007), (Ryan (2010)).

Nelayan artisanal yang termasuk sebagai *small scale fishery* adalah orang pemilik perahu yang sebagian besar penghasilannya bergantung pada kegiatan penangkapan ikan di laut, mengoperasikan sendiri perahunya dengan ukuran berat perahu antara 2,75–25 GT (atau ukuran panjang perahu antara 5 meter hingga 15 meter, lebar antara 1,5 meter hingga 6 meter menggunakan peralatan tangkap ikan sederhana (seperti gilnet, jaring badut, *minitrawl*, pancing, rawai pancang), menggunakan sistem penghasilan bagi hasil antara pemilik dan anak buah kapal, dan menjual hasil

tangkapan ikan dalam lingkup pasar lokal yang terbatas (Berkes *et al* (2001), Charles (2001), Satria (2002), Luky (2007)). Di Indonesia masyarakat nelayan merupakan salah satu golongan masyarakat yang dianggap miskin secara absolut, bahkan paling miskin diantara penduduk miskin (*the poorest of the poor*; Mukflihati, 2010). Berbagai studi juga telah menunjukkan bahwa kondisi nelayan, khususnya nelayan perikanan skala kecil di Indonesia berada pada tingkat marjinal (Kusnadi, 2000; Semedi, 2003; Budi, 2008).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan, meskipun dalam implementasinya kebijakan yang dikeluarkan pemerintah selalu tidak berpihak kepada nelayan. atau lemahnya penerapan hukum regulasi tersebut. Kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah dimulai dari keluarnya kebijakan Revolusi Biru sejak tahun 1970-an hingga regulasi di tingkat undang-undang pada saat ini. Bila di bidang pertanian pada saat yang sama pemerintah mengeluarkan kebijakan Revolusi Hijau dalam rangka modernisasi sistem pertanian untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan petani, Revolusi Biru dikeluarkan oleh pemerintah sebagai kebijakan politik perikanan yang pada awalnya ingin mengikuti kisah sukses di bidang pertanian. Target Revolusi Biru adalah peningkatan kesejahteraan nelayan melalui upaya peningkatan efisiensi dan produktivitas perikanan, khususnya sumberdaya laut dengan berbagai varian kebijakan. Kebijakan mulai dari modernisasi penggunaan motorisasi dan teknologi alat tangkap yang modern, kebijakan pemberian fasilitas kredit berupa kredit usaha, mesin-mesin, perahu-perahu dan peralatan penting kepada nelayan, serta pembangunan fasilitas infrastruktur yang mendukung kegiatan perikanan untuk menjamin efektivitas dan peningkatan produksi berupa pengeringan perikanan, ruang pendingin, tempat pengeringan ikan dan pelelangan ikan (TPI). Pada tahun 1980-1996, kebijakan ini diperbaharui dengan diluncurkannya deregulasi perikanan yang mencakup pengembangan alat tangkap, pembangunan pelabuhan dan penambahan armada penangkapan ikan melalui kemampuan produksi dalam negeri maupun impor kapal bekas serta pemberian izin kapal asing.

Dampak kebijakan Revolusi Biru yang dikeluarkan pemerintah memang cukup fantastis. Sejak tahun 1970 hingga 2003 terjadi peningkatan produksi perikanan

baik perikanan tangkap maupun budidaya. Hal ini dikarenakan Revolusi Biru yang didukung aktivitas usaha berskala besar dan padat modal menjustifikasi adanya penetrasi kapitalisme yang tidak berbasis pada kemandirian nelayan kecil dan petani ikan. Secara khusus, ada enam implikasi yang muncul akibat dari perkembangan ini (Tridoyo, 2004). Pertama, degradasi sumberdaya ikan, penurunan daya dukung lingkungan laut dan kerusakan ekosistem. Kedua, menciptakan ketimpangan kelas yang lebar antara pemilik kapal dan buruh nelayan. Ketiga, degradasi hutan mangrove dan pengalihan lahan tambak kepada pemodal. Keempat, konflik ruang di wilayah pesisir yang disebabkan oleh wilayah kegiatan perikanan, pelabuhan, pariwisata, industri maupun kawasan konservasi. Kelima, rendahnya kapasitas sumberdaya manusia nelayan sehingga produktifitas mereka juga rendah. Keenam, ketidakadilan struktural yang merugikan nelayan miskin dalam keterbatasan akses modal.

Upaya lain yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup nelayan diantaranya adalah melalui program penyaluran kredit usaha kepada nelayan dan bantuan subsidi bahan bakar minyak (BBM), Keputusan Menteri Pertanian No. 607.Kpts/Um/9/1976 tentang pembagian wilayah penangkapan berdasarkan tingkat kualifikasi peralatan tangkap yang dimiliki oleh nelayan, Keppres No.39/1980 tentang penghapusan operasi kapal pukat harimau, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta lahirnya Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat yang mengalokasikan dana sebesar Rp.927,82 miliar untuk menyejahterakan nelayan. Dalam kenyataannya, penegakkan regulasi dan implementasi program-program tersebut hingga saat ini sangat lemah. Ada indikasi seolah-olah regulasi dan kebijakan tersebut tidak pernah ada sebagaimana stagnasi yang terjadi pada peningkatan kesejahteraan hidup nelayan. Ujungnya, pengalokasian sumberdaya dan sumberdana dalam sistem perikanan perikanan tangkap bagi nelayan kecil masih jauh dari kondisi yang dapat meningkatkan kualitas hidup nelayan.

Sistem kegiatan perikanan tangkap nelayan artisanal terdiri atas 4 (empat) aspek kegiatan (Kusnadi, 2000; Charles, 2001). Pertama adalah kegiatan dalam bidang penggunaan teknologi alat tangkap dan alat bantu tangkap berkaitan dengan *capital dynamics*, yaitu armada, alat tangkap (*fleet*) dan alat bantu tangkap yang mendorong hasil tangkapan maksimal dengan dampak seminimal mungkin terhadap lingkungan fisik. Kedua, kegiatan dalam bidang kegiatan persiapan dan operasi penangkapan yang berisi tentang kemampuan nelayan menentukan waktu musim ikan, lokasi penangkapan ikan, ukuran dan jenis ikan yang boleh ditangkap serta kondisi cuaca yang memungkinkan untuk melaut.

Ketiga, kegiatan dalam bidang pengerahan tenaga kerja dan modal yang berisi tentang kemampuan nelayan untuk mengoptimalkan tenaga kerja dan modal yang ada dalam mengoperasikan perahu beserta alat tangkap. Keempat, kegiatan dalam bidang menjaga mutu hasil tangkapan dan pemasaran ikan berkaitan dengan kemampuan nelayan mengupayakan mutu ikan yang baik tetap terjaga untuk mencapai harga jual ikan yang setinggi-tingginya.

Merujuk kepada perspektif Theory Planned Behavior (Ajzen, 2005) yang menempatkan komponen sikap (*attitude*), norma subjektif (*subjectif norm*) dan keyakinan kemampuan berperilaku (*perceived behaviour control*) sebagai aspek yang mempengaruhi niat untuk berperilaku (*behaviour intention*) untuk memperkirakan perilaku, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji keberlakuan perspektif Theory Planned Behavior pada masyarakat nelayan di pantai Utara Provinsi Jawa Barat. Pengujian perspektif teori ini dilakukan dengan cara (1) menemukan faktor-faktor yang berpengaruh pada niat untuk berperilaku nelayan artisanal dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir, (2) mengetahui berapa besar pengaruh faktor niat untuk berperilaku tersebut terhadap perilaku nelayan artisanal dalam memanfaatkan sumberdaya; dan (3) mengetahui berapa besar pengaruh faktor latar belakang berupa karakteristik demografi terhadap sikap (*attitude*), norma subjektif (*norma subjective*) dan keyakinan kemampuan berperilaku (*perceived behavior control*) pada nelayan di pantai Utara Provinsi Jawa Barat.

2. Metode Penelitian

Desain, Lokasi dan Waktu. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif *ex post facto* di 16 desa yang tercakup dalam 11 wilayah kecamatan yang tersebar dalam 5 wilayah kabupaten di pantai utara Provinsi Jawa Barat. Kelima kabupaten tersebut adalah kabupaten Cirebon, Indramayu, Subang, Karawang dan Bekasi.

Teknik Penarikan Sampel. Unit pengamatan terkecil yang diamati pada penelitian ini adalah rumah tangga nelayan artisanal pemilik perahu yang mengoperasikan sendiri perahunya di wilayah terpilih. Jumlah rumah tangga nelayan artisanal di desa pantai utara Provinsi Jawa Barat seluruhnya 10.404 KK. Penentuan jumlah sampel mengacu pada rumus Slovin dengan tingkat kesalahan sebesar 5%, yaitu 400 rumah tangga.

Jenis dan Teknik Pengumpulan Data. Data yang terkumpul merupakan data primer yang mencakup karakteristik demografi, sikap, norma subjektif, keyakinan kemampuan berperilaku, niat untuk berperilaku dan perilaku nelayan dalam kegiatan perikanan tangkap. Data ini diperoleh dengan melalui wawancara dengan menggunakan instrumen kuesioner.

Pengolahan dan Analisis Data. Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS for Windows dan Lisrel 8.54. Analisis data dibedakan atas analisis deskriptif dan analisis inferensial. Analisis statistik inferensial yang digunakan adalah *Structural Equation Model* (SEM). Pengujian kesesuaian model dilakukan dengan menggunakan beberapa ukuran model GFT (*Goodness of Fit Test*). Menurut Kusnendi (2008), suatu model struktural diindikasikan sesuai atau fit bila memenuhi tiga jenis GFT, yaitu (1) Uji chi kuadrat dengan $p\text{-value} \geq 0,05$; (2) RMSEA (*Root Means Square Error of Approximation*) $\leq 0,08$ dan (3) CFI (*Comparative Fit Indeks*) $\geq 0,90$.

Enam variabel dengan 57 indikator dijabarkan dalam hubungan antar variabel tersebut. Keenam variabel tersebut adalah karakteristik individu (X1), sikap; *attitude*), norma subjektif (*subjective norm*; X3), keyakinan kemampuan berperilaku (*perceived behavior control*; X4), Niat untuk berperilaku (*behavior intention*; Y1) dan perilaku (*behavior*; Y2).

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran hubungan antar variabel tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku nelayan artisanal dalam kegiatan perikanan tangkap di pantai Utara Provinsi Jawa Barat dijabarkan dalam Gambar 1.

Pengujian Hipotesis Model

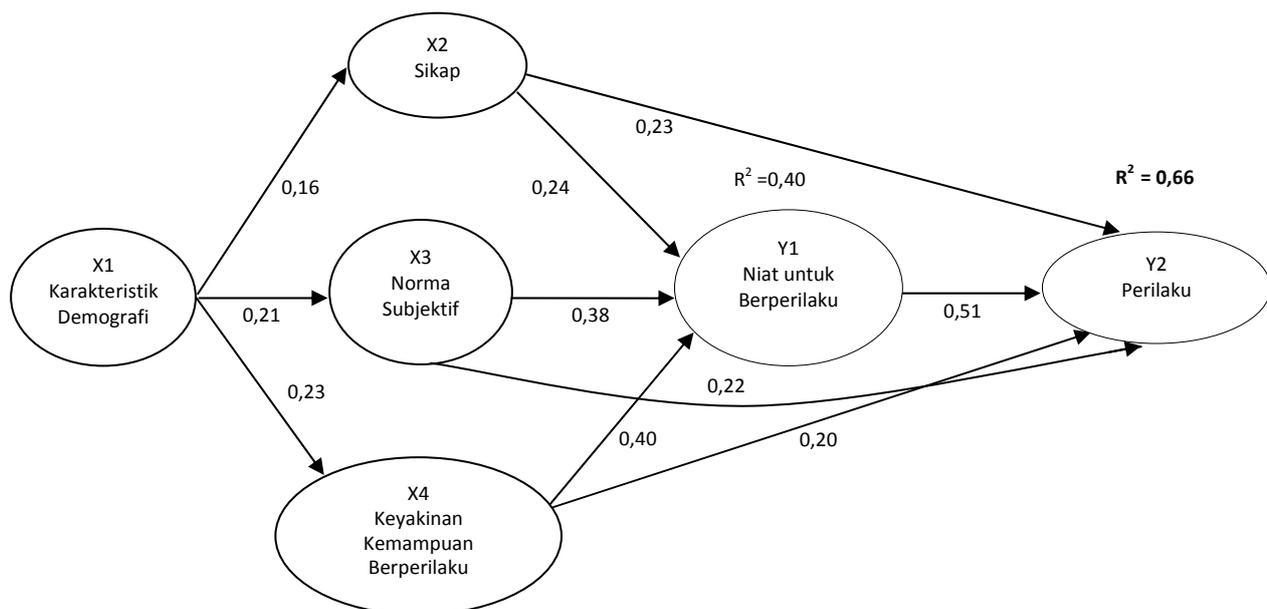
a. Hipotesis 1: “Karakteristik demografi (X1) berpengaruh positif terhadap sikap (X2)”. Gambar 1 menunjukkan adanya pengaruh langsung variabel karakteristik terhadap sikap nelayan sebesar 0,16 yang

nyata pada $\alpha = 0,05$. Persamaan matematika, model struktural sikap nelayan adalah $X2 = 0,16 X1$. Berdasarkan hal ini, maka hipotesis 1 diterima.

b. Hipotesis 2: “Karakteristik demografi (X1) berpengaruh positif terhadap norma subjektif (X3)”. Gambar 1 menunjukkan adanya pengaruh langsung variabel karakteristik terhadap norma subjektif nelayan sebesar 0,21 yang nyata pada $\alpha = 0,05$. Persamaan matematik model struktural sikap nelayan adalah $X3 = 0,21 X1$. Berdasarkan hal ini, maka hipotesis 2 diterima.

c. Hipotesis 3: “Karakteristik demografi (X1) berpengaruh positif terhadap keyakinan kemampuan berperilaku (X4)”. Gambar 1 menunjukkan adanya pengaruh langsung variabel karakteristik terhadap keyakinan kemampuan berperilaku sebesar 0,23 yang nyata pada $\alpha = 0,05$. Persamaan matematik model struktural sikap nelayan adalah $X4 = 0,23 X1$. Berdasarkan hal ini, maka hipotesis 3 diterima.

d. Hipotesis 4: “Sikap (X2), norma subjektif (X3) dan keyakinan kemampuan berperilaku (X4) berpengaruh positif terhadap niat untuk berperilaku (Y1)”. Gambar 1 menunjukkan adanya pengaruh langsung variabel sikap, norma subjektif dan keyakinan kemampuan berperilaku terhadap niat untuk berperilaku masing-masing secara berturut-turut sebesar 0,24; 0,38 dan 0,40 yang nyata pada $\alpha = 0,05$. Persamaan matematik model struktural niat untuk berperilaku adalah $Y1 = 0,24 X2 + 0,38 X3 + 0,40 X4$. Secara bersama, pengaruh ketiga variabel (X2, X3 dan X4) pada niat untuk berperilaku nelayan adalah sebesar 40 persen yang nyata pada $\alpha = 0,05$. Berdasarkan hal ini, maka hipotesis 4 diterima.



Gambar 1. Hubungan antar Variabel Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Nelayan Artisanal dalam Kegiatan Perikanan Tangkap di Pantai Utara Provinsi Jawa Barat

e. Hipotesis 5: “Niat untuk berperilaku (Y1) berpengaruh positif terhadap perilaku (Y2)”. Gambar 1 menunjukkan pengaruh variabel niat untuk berperilaku terhadap perilaku nelayan sebesar 0,51. Secara matematik persamaan model struktural perilaku nelayan adalah $Y_2 = 0,51 Y_1$. Maka hipotesis 5 diterima.

Pentingnya Niat untuk Berperilaku terhadap Perilaku. Perspektif *theory planned behavior* (TPB) bukan tidak menimbulkan kritik terutama dalam menjawab pertanyaan bagaimana pentingnya variabel niat untuk berperilaku terhadap perilaku individu. Kritik utama yang muncul adalah bahwa TPB dianggap hanya dapat memprediksi perilaku manakala beberapa aspek dari perilaku tidak dibawah kontrol kemauan yang kuat. Demikian pula dengan pertanyaan seberapa lama interval waktu antara niat untuk berperilaku dengan perilaku seseorang. Kritik lain terhadap teori ini bahwa TPB didasari oleh asumsi bahwa manusia berpikir secara rasional dan memiliki keputusan yang sistematis yang didasari oleh ketersediaan informasi yang cukup untuk memutuskan berperilaku. Motif yang muncul secara serentak tidak masuk dalam pertimbangan (Bright, 1993). Untuk menguji kritik tersebut, penelitian ini juga melihat hubungan langsung antara variabel sikap, norma subjektif dan keyakinan kemampuan berperilaku terhadap variabel perilaku tanpa melalui variabel niat untuk berperilaku dengan menggunakan alat analisis SEM (Gambar 1).

Gambar 1 menunjukkan model yang melihat hubungan secara langsung antara variabel sikap (X2), variabel norma subjektif (X3) dan variabel keyakinan kemampuan berperilaku (X4) terhadap variabel perilaku (Y2). Hubungan variabel sikap (X2) dengan variabel perilaku (Y2) sebesar 0,23, hubungan variabel norma subjektif (X3) dengan variabel perilaku (Y2) sebesar 0,22, dan hubungan variabel keyakinan kemampuan berperilaku (X4) dengan variabel perilaku (Y2) sebesar 0,20 dengan nilai koefisien determinan sebesar (R^2) sebesar 0,66. Nilai koefisien determinan (R^2) hubungan langsung variabel sikap (X2), norma subjektif (X3) dan keyakinan kemampuan berperilaku (X4) terhadap variabel niat untuk berperilaku (Y1) pada model yang sama adalah 0,40.

Merujuk pada model tersebut, maka dapat dikatakan bahwa perilaku individu selain dapat dipengaruhi secara positif oleh niat untuk berperilaku, dapat juga tidak ditentukan oleh niat untuk berperilaku. Temuan penelitian ini juga mempertegas kritik utama terhadap perspektif TPB yang menyatakan bahwa TPB hanya mungkin dapat diaplikasi manakala individu memiliki informasi memadai yang mendorong munculnya niat untuk berperilaku.

Penelitian ini melihat perbandingan besaran nilai koefisien determinan variabel niat untuk berperilaku

(Y1) dan variabel perilaku (Y2) yaitu sebesar 0,40 dan 0,66. Hal ini menunjukkan bahwa kecenderungan nelayan di pantai utara Provinsi Jawa Barat untuk berperilaku secara spontan (tanpa disertai dengan niat untuk berperilaku) lebih besar dibandingkan dengan perilaku yang diawali oleh niat untuk berperilaku. Nelayan yang cenderung memiliki niat untuk berperilaku adalah nelayan yang telah memiliki informasi lebih komprehensif tentang kegiatan perikanan tangkap dibandingkan dengan nelayan yang cenderung berperilaku dengan tidak diawali oleh niat untuk berperilaku. Lebih tingginya nilai koefisien determinan variabel perilaku (Y2) dibandingkan dengan variabel niat untuk berperilaku (Y1) mengindikasikan masih minimnya informasi yang dimiliki oleh nelayan pantai utara Provinsi Jawa Barat tentang kegiatan perikanan tangkap secara komprehensif. Argumentasi ini dipertegas dengan temuan statistik deskriptif berupa masih minimnya keikutsertaan nelayan pantai utara Provinsi Jawa Barat dalam kegiatan pendidikan non formal di bidang perikanan tangkap. Walaupun nelayan telah berperilaku positif dalam kegiatan perikanan tangkap, maka perilaku tersebut lebih disebabkan sebagai perilaku spontan yang tidak disertai oleh pengetahuan dalam kegiatan perikanan secara komprehensif.

Adanya faktor niat untuk berperilaku (meski nilai koefisien determinannya lebih kecil dibandingkan dengan perilaku yang tidak disertai oleh niat), sejalan dengan perspektif TPB dan perspektif teori *communication and human behavior*. Menurut perspektif teori ini, perilaku merupakan suatu tindakan manusia yang diawali oleh adanya proses input berupa informasi yang masuk dari tiap individu (Ruben, 1992) yang bergantung pada penting atau tidaknya nilai informasi yang masuk dan diinterpretasi oleh individu tersebut. Bila dirasakan penting, informasi akan disimpan oleh individu dalam *longterm memory*. Sebaliknya bila dirasakan tidak penting maka informasi akan disimpan dalam *shortterm memory* dengan kemungkinan besar individu akan melupakan informasi tersebut. Adanya asupan informasi yang diproses dalam diri individu memungkinkan individu mempunyai niat untuk berperilaku sebelum ia berperilaku.

Perspektif teori *operant conditioning* yang digagas dari Skinner (Brophy, 1990), memperkuat argumentasi adanya niat untuk berperilaku sebelum seseorang melakukan perilaku. Menurut Skinner, perilaku individu merupakan hasil dari suatu proses belajar. Bagi Pavlov, tingkahlaku terjadi bila ada stimuli khusus, sementara Skinner menambahkan bahwa tingkahlaku demikian hanya menerangkan untuk sebagian kecil dari semua kegiatan. Skinner berpendapat, ada bentuk tingkahlaku lain yang dia labelkan dengan kata tingkahlaku *operant conditioning*. Skinner memusatkan hubungan antara tingkahlaku dan konsekuensi. Contoh, jika

menyenangkan, individu akan menggunakan tingkahlaku itu lagi sesering mungkin. Menggunakan konsekuensi yang menyenangkan dan tidak menyenangkan dalam mengubah tingkahlaku, sering disebut sebagai *operant conditioning*. Konsekuensi menyenangkan akan memperkuat tingkahlaku, sementara konsekuensi yang tidak menyenangkan akan memperlemah tingkahlaku. Konsekuensi yang menyenangkan tersebut akan memunculkan niat berperilaku individu untuk mengulangi perilaku tersebut.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan temuan penelitian-penelitian lain yang menggunakan perspektif TPB untuk mengukur perilaku yang diawali dengan niat untuk berperilaku (misalnya Beedell dan Rehman (2000), Arifin (1995), Seen (2001), Conner (2002), Elliot (2003), Carey (2007), Ginis, (2007) Ryan J (2010).

Pengaruh variabel sikap, norma subjektif dan keyakinan kemampuan berperilaku terhadap variabel niat untuk berperilaku ($R^2 = 0,40$), mengindikasikan adanya pengaruh variabel lain sebesar 60% diluar variabel sikap, norma subyektif dan keyakinan kemampuan berperilaku yang mempengaruhi variabel niat untuk berperilaku. Demikian pula dengan pengaruh variabel niat untuk berperilaku terhadap variabel perilaku sebesar 0,51 mengindikasikan bahwa niat untuk berperilaku nelayan dalam melakukan kegiatan penangkapan ikan, tidak sepenuhnya sejalan dengan perilaku yang dikerjakannya.

Bagaimana mungkin variabel lain sebesar 60% dapat mempengaruhi niat untuk berperilaku nelayan, atau pengaruh variabel lain sebesar 34% dapat mempengaruhi secara langsung perilaku nelayan? Untuk menjelaskan hal ini, maka teori strukturasi dapat digunakan sebagai "pisau" analisis.

Teori strukturasi menjelaskan perbedaan antara *agen* (dalam tingkat mikro) dan struktur (dalam tingkat makro; Ritzer, 2004). Agen merujuk kepada kapasitas seseorang untuk bertindak secara independen dan membuat pilihan mereka sendiri. Pada sisi yang lain, struktur secara luas merujuk pada penataan terpola berulang yang nampaknya mempengaruhi atau membatasi pilihan dan kesempatan yang dimiliki seseorang. Salah satu komponen dari teori strukturasi adalah pemikiran Giddens tentang agen. Dalam upaya mencari rasa aman, agen (*actor*) merasionalisasikan dunia mereka untuk membuat mereka menjalani kehidupan sosial secara efisien. Pada kasus nelayan artisanal di pantai utara Provinsi Jawa Barat, agen (*actor*) adalah para nelayan artisanal tersebut dengan perbedaan latarbelakang karakteristik demograsi yang berbeda. Semua tindakan sosial melibatkan struktur, dan semua struktur melibatkan tindakan sosial. Agen dan struktur terjalin erat dalam aktivitas yang terus-menerus

dijalankan manusia. Pada kasus nelayan artisanal di pantai utara Provinsi Jawa Barat seperti penelitian ini, struktur yang dimaksud adalah lingkungan yang memberikan konteks bagi aktor para nelayan dalam berperilaku.

Sejalan dengan konsep agen dan struktur tersebut, penelitian Kusnadi (2000) juga menegaskan adanya faktor-faktor struktur yang menjadikan nelayan tetap menjadi miskin. Faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan ke dalam faktor internal (mikro) dan faktor eksternal (makro). Faktor internal adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan sumberdaya manusia nelayan dan aktivitas kerja mereka, yaitu (1) keterbatasan kualitas sumberdaya manusia, (2) keterbatasan kemampuan modal usaha dan teknologi penangkapan, (3) hubungan kerja (pemilik perahu-nelayan buruh), (4) kesulitan melakukan diversifikasi usaha penangkapan, (5) kebergantungan yang tinggi terhadap okupasi melaut dan (6) gaya hidup hidup yang kurang berorientasi ke depan. Faktor-faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi di luar diri dan aktivitas kerja nelayan, yang meliputi (1) masalah kebijakan pembangunan yang lebih berorientasi pada produktivitas untuk menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, parsial dan tidak memihak nelayan tradisional, (2) sistem pemasaran hasil perikanan yang lebih menguntungkan pedagang perantara, (3) kerusakan ekosistem pesisir dan laut karena pencemaran dari wilayah darat, (4) praktek penangkapan ikan dengan bahan kimia, merusakkan terumbu karang dan konversi hutan bakau di kawasan pesisir, (5) penggunaan peralatan tangkap yang tidak ramah lingkungan, (6) terbatasnya pengolahan teknologi pengolahan hasil tangkap pasca penangkapan, (7) terbatasnya peluang-peluang kerja di sektor non perikanan yang tersedia di desa-desa nelayan, (8) kondisi alam dan fluktuasi musim yang tidak memungkinkan nelayan melaut sepanjang tahun, dan (9) isolasi geografis desa nelayan yang mengganggu mobilitas barang, jasa, modal dan manusia.

Urgensi temuan penelitian. Merujuk pada pokok-pokok temuan penelitian ini, maka dapat disampaikan urgensi temuan penelitian ini adalah pada (a) dan (b). Aspek pengembangan teori. Ada perilaku yang diawali dengan niat untuk berperilaku, di sisi lain ada pula perilaku yang tidak diawali oleh niat untuk berperilaku. Kecenderungan individu nelayan artisanal di pantai utara Provinsi Jawa Barat untuk berperilaku yang tidak diawali dengan niat untuk berperilaku lebih besar dibandingkan dengan perilaku yang diawali oleh niat untuk berperilaku. Temuan penelitian ini memperkuat tesis TPB bahwa perilaku individu diawali oleh niat untuk berperilaku, namun demikian menegaskan kecenderungan yang lebih besar akan adanya perilaku yang tidak diawali oleh niat untuk berperilaku dapat terjadi. Dengan demikian, meskipun statistik deskriptif

perilaku nelayan dalam kegiatan perikanan tangkap berada pada skor rata-rata positif, perilaku tersebut masih harus diperkuat dengan asupan informasi dalam bentuk program penguatan keberdayaan nelayan sehingga dapat mencapai skor perilaku yang sangat positif. Adanya unsur niat untuk berperilaku sebelum nelayan melakukan perilaku dalam kegiatan perikanan tangkap, dapat menjadi titik masuk (*entry point*) dalam menyusun proses pembelajaran bagi nelayan yang selanjutnya akan menentukan perilaku nelayan.

a. Aspek Ko-Manajemen Kegiatan Perikanan di Desa-desanya Wilayah Studi. Bila terdapat kecenderungan lebih besar adanya perilaku nelayan yang tidak disertai oleh niat untuk berperilaku dalam kegiatan perikanan tangkap di pantai Utara Provinsi Jawa Barat, bagaimana urgensi temuan penelitian ini terhadap aspek ko-manajemen kegiatan perikanan tangkap di desa-desanya wilayah studi?

Salah satu persoalan ekonomis yang mendasar pada kerja penangkapan ikan laut adalah sifat kepemilikan ikan laut sebagai sumber milik bersama (Semedi, 2002). Keadaan ini mengakibatkan berkembangnya sifat individualistik yang tinggi di kalangan para nelayan bahwa semua nelayan berkeinginan untuk memetik manfaat sebesar-besarnya dari sumberdaya yang ada tanpa ada seorangpun di antara mereka yang mau melakukan sesuatu untuk menjaga agar sumberdaya tersebut tetap ada pada tingkat yang menguntungkan (Hardin, 1968). Salah satu alternatif untuk menjaga agar tragedi sumberdaya milik umum ini tidak terjadi adalah diubahnya status dari milik umum (bukan milik siapapun) menjadi milik orang tertentu agar stok ikan laut ini berada dibawah klaim kepemilikan tunggal (Scott, 1986). Dengan cara ini si pemilik dapat melakukan eksploitasi pada tingkat ekonomis yang optimal.

Alternatif lain untuk mencegah tragedy sumberdaya milik bersama adalah dengan melakukan kontrol terhadap kegiatan penangkapan ikan (Semedi, 2002). Di sini para nelayan diatur agar tidak melakukan penangkapan melewati daya dukung stok ikan yang ada.

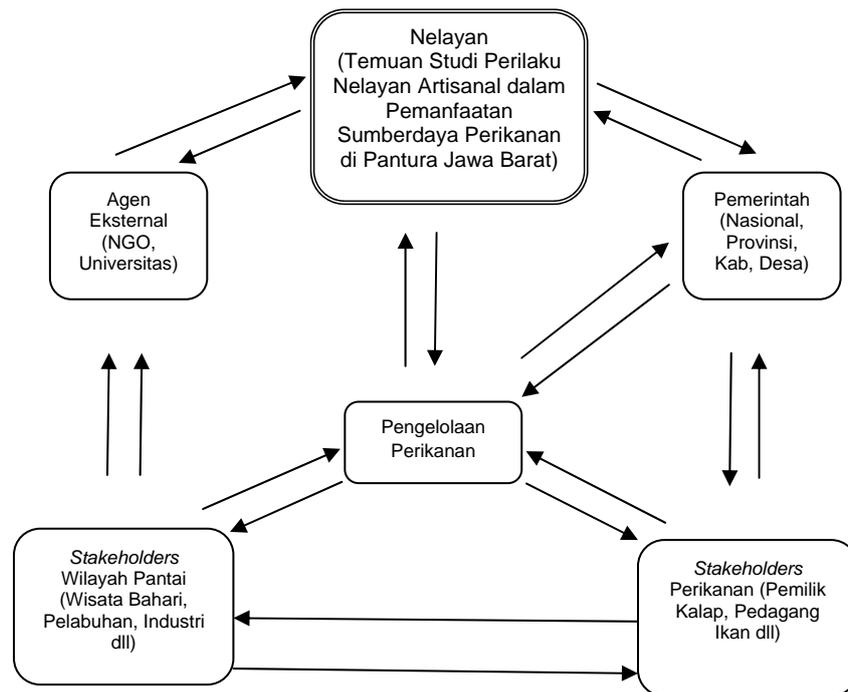
Pada sisi yang lain, perairan wilayah pantai utara Provinsi Jawa Barat, merupakan daerah perikanan yang bila dilihat dari kepemilikannya merupakan kawasan tumpang tindih dalam penguasaan, yaitu *common property right*, *state property right* dan *private property right*. *Common property right* di perairan pantai utara Provinsi Jawa Barat ditunjukkan dengan penggunaan alat tangkap *trawl* dan sejenisnya yang merusak lingkungan demi mendapatkan hasil tangkapan maksimal meski hal ini dilarang. *State property right* ditunjukkan dengan penguasaan wilayah laut oleh Negara dengan pemanfaatan dilakukan oleh masyarakat sebagai *stakeholders* (termasuk nelayan) demi

kepentingannya masing-masing. *Private property right* ditunjukkan dengan penguasaan sebagian wilayah laut oleh pihak swasta yang tidak memungkinkan *stakeholders* lain memasuki wilayah perairan tersebut. Situasi ini diantaranya ditunjukkan dengan kasus pengkaplingan laut dan adanya fasilitas anjungan milik perusahaan migas *offshore* yang tidak boleh dimasuki oleh nelayan dalam radius 500 meter sekitarnya. Adanya perbedaan *regim property* ini, menimbulkan konflik antar *stakeholders*. Pada beberapa lokasi, kasus konflik sejenis sudah terjadi di perairan pantai utara Provinsi Jawa Barat.

Dari perspektif ko-manajemen perikanan, pengelolaan perikanan tidak dapat dilepaskan dari filosofi keterkaitan antara ekosistem, sumberdaya perikanan dan manusia yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya perikanan itu sendiri. Pengelolaan perikanan tidak akan pernah ada apabila ekosistem dan sumberdaya perikanan sebagai salah satu "produk" ekosistem alam (air tawar, air laut, payau dan lain-lain) mengalami degradasi atau punah (Adrianto *et al*, 2009). Dalam konteks ini, interaksi yang ada dalam sistem alam (ekosistem perairan) dan sistem manusia (*social agent and actor*) serta prinsip-prinsip yang melatarbelakangi bagaimana kedua system ini bekerja perlu diketahui dengan baik. Dasar pemahaman inilah yang menjadi latar belakang dari seluruh pola tata kelola perikanan dalam bentuk ko-manajemen perikanan (*fisheries co-management*).

Ko-manajemen perikanan adalah pola pengelolaan dimana pemerintah dan pelaku pemanfaatan sumberdaya berbagi tanggungjawab dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan dengan tujuan mewujudkan keseimbangan tujuan ekonomi dan sosial dalam kerangka kelestarian ekosistem dan sumberdaya perikanan (Adrianto *et al.*, 2009). Sebagai suatu proses, di dalam ko-manajemen perikanan terdapat 4 *stakeholders* kunci, yaitu (1) pelaku pemanfaat sumberdaya dimana dalam kelompok ini termasuk nelayan dan pembudidaya ikan, (2) pemerintah, termasuk pusat dan daerah, (3) *stakeholders* lain dimana didalamnya termasuk anggota masyarakat lain, pemilik kapal, pelaku perdagangan perikanan, pengolah ikan dan lain-lain, dan (4) agen perubahan termasuk penyuluh perikanan, LSM, perguruan tinggi dan lembaga riset.

Dalam konteks temuan penelitian tentang perilaku nelayan artisanal di pantai utara Provinsi Jawa Barat, terjadi juga nelayan tangkap artisanal merupakan salah satu *stakeholders* penting sebagai pelaku yang langsung melakukan eksploitasi sumberdaya perikanan. Di tengah semakin tingginya degradasi sumberdaya perikanan di perairan pantai Utara Provinsi Jawa Barat, semakin terbatasnya daerah penangkapan ikan mereka karena pemanfaat wilayah perairan semakin kompleks,



Gambar 2. Keterlibatan Banyak Pihak dalam Pengelolaan Perikanan dan Urgensi Temuan Studi Perilaku Nelayan Artisanal dalam Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan di Pantura Jawa Barat (Berkes, et al., 2000), (Adrianto, et al. 2009)

ketidakpastian kondisi alam (cuaca) serta ketidakpastian regulasi yang berpihak kepada nelayan dan lemahnya penegakkan hukum dari regulasi tersebut. Nelayan artisanal di pantai utara Provinsi Jawa Barat harus melakukan perilaku kegiatan perikanan tangkap untuk memenuhi kebutuhan ekonomi dan sosial mereka.

Proses ko-manajemen perikanan di pantai utara Provinsi Jawa Barat adalah proses yang melibatkan *multi-stakeholders* termasuk nelayan artisanal sebagai salah satu pelaku utama dalam kegiatan perikanan tangkap. Sejalan dengan hal tersebut, temuan penelitian ini telah menyediakan gambaran tentang perilaku nelayan artisanal di tingkat rumah tangga dalam menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku nelayan pada proses kegiatan perikanan tangkap di pantai utara Provinsi Jawa Barat. Sebagai suatu kegiatan yang kompleks, ko-manajemen perikanan di pantai utara Provinsi Jawa Barat harus pula melakukan identifikasi dan pemetaan terhadap peran-peran yang dilakukan oleh *stakeholders* lain. Temuan studi ini mendorong ke arah visi baru dalam pengembangan kegiatan perikanan nelayan skala kecil. Menurut Berkes *et al.* (2000), visi baru pengembangan kegiatan perikanan nelayan kecil diawali dengan perubahan secara gradual pendekatan *top-down* ke arah *bottom-up* yang sebenarnya sudah dimulai sejak tahun 1980-an. Prioritas nilai-nilai lokal dibutuhkan sebagai acuan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir yang menyeimbangkan antara dampak dari globalisasi dengan menyediakan kearifan lokal sebagai identitas sosial dan modal sosial

guna membantu nelayan tetap bertahan hidup dalam kesatuan antara lingkungan di tengah ekonomi global.

4. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa perspektif *theory planned behavior* dapat digunakan untuk melihat niat untuk berperilaku dan perilaku nelayan artisanal di pantai Utara Provinsi Jawa Barat, meskipun dimungkinkan adanya perilaku yang dilakukan tanpa melalui niat untuk berperilaku. Faktor-faktor karakteristik demografi berpengaruh secara langsung pada sikap, tingkat kepatuhan dan kompetensi nelayan dalam kegiatan perikanan tangkap. Faktor sikap, tingkat kepatuhan dan kompetensi berpengaruh secara langsung pada niat untuk berperilaku nelayan dalam kegiatan perikanan tangkap. Faktor niat untuk berperilaku berpengaruh secara langsung pada perilaku nelayan dalam kegiatan perikanan tangkap. Koefisien determinasi antara variabel sikap, tingkat kepatuhan, kompetensi terhadap variabel niat untuk berperilaku sebesar 0,40. Kondisi ini mengindikasikan adanya faktor variabel lain sebesar 60% di luar variabel penelitian ini yang mempengaruhi niat untuk berperilaku. Sementara itu, pengaruh variabel niat untuk berperilaku terhadap perilaku sebesar 0,51 mengindikasikan bahwa tidak sepenuhnya niat untuk berperilaku nelayan terwujud sesuai dengan perilaku mereka dalam kegiatan perikanan tangkap, Temuan penelitian ini yang menjelaskan tentang faktor-faktor

yang mempengaruhi perilaku nelayan artisanal dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan, dapat memberikan kontribusi terhadap kegiatan ko-manajemen perikanan di Indonesia, khususnya pada komunitas di wilayah studi di pantai utara Provinsi Jawa Barat.

Ucapan Terima Kasih

Penelitian ini didanai oleh Hibah Riset Awal Universitas Indonesia tahun anggaran 2010–2011 dengan surat perjanjian nomor: 2482/H2.R12/PPM.00.01 Sumber pendanaan 2010.

Daftar Acuan

- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, Personality and Behaviour*. New York: McGraw-Hill Education.
- Satria, A. (2002). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Cidesindo.
- Arifin, F.X.S. (1995). *Hubungan Sikap dan Norma Subjektif dengan Intensi Bersangama pada Mahasiswa di Jakarta*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia.
- Beedell, J., & Rehman, T. (2000). Using Social Psychology Models to Understand Farmers' Conservation Behaviour. *Journal of Rural Studies*, 6.
- Bright A.D. (1993). Application of the theory of reasoned action to the national park service's controlled burn policy. *Journal of Leisure Research*, 25(3), 263–281.
- Brophy, J.E., & Thomas L.G. (1990). *Educational Psychology Realistic Approach*. London: Longman.
- Budi, S. (2008). *Kemiskinan dan Perlawanan Kaum Nelayan*. Malang: Laskbang Mediatama.
- Carey, K.B. (2007). *The Theory Planned Behavior as A Mode of Heavy Episodic Drinking Among College Student*, dalam *Journal Psychology of Addictive Behavior*, 21(4), 498–507. www.proquest.pqd/web.
- Charles, T.A. (2001). *Sustainable Fishery System*. London: Blackwell Science.
- Conner, M., et al., (2002). *The Theory Planned behavior and Health Eating*, dalam *Journal Health Psychology*, 21, (2), 194–201. www.proquest.pqd/web.
- Elliot, M.A. (2003). *Driver,s Compliance with Speed Limit: An Application of the Theory Planned Behavior* dalam *Journal of Applied Psychology*, 88(5), 964–972. www.proquest.pqd/web.
- Fikret, B., Mahon, R., McConney, P., Pollnac, R., & Pomeroy, R. (2001). *Managing Small-scale Fisheries: Alternative Directions and Methods*. Ottawa: International Development Research Center.
- Fishbein, A. (1975). *Belief, Attitude, Intention and Behavior: A Introduction to Theory and Research*. Canada: Addison-Wesley.
- Ginis, M. (2007). *Using Theory Planned behavior to Predict Leisure Time Physical Activity among People with Chronic Kidney Disease* dalam *Journal Rehabilitayion Psychology*, 52(4). 435–442. www.proquest.pqd/web.
- Hardin, G. (1968). Tragedy of the commons, *Science*, 162, 1243–1248.
- Muflikhati, I. (2010). Kondisi Sosial Ekonomi dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga: Kasus di Wilayah Pasisir Jawa Barat. *Jurnal Ilmu Keluarga*, 2-10.
- Kusnadi, (2000). *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Kusnendi. (2008). *Model-model Persamaan Struktural, Satu Multigoup Sampel dengan Lisrel*. Bandung: Penertbit Alfabeta.
- Luky, A., Hartato, D.I., Kalikoski. D., & Yunanda, T. (2009). *Peningkatan Kapasitas untuk Pengarus-Utamaan Ko-Manajemen Perikanan di Indonesia*. Jakarta: FOA dan DKP.
- Luky, A. (2007). *A Snapshot on Small Scale Fisheries. Sebuah Pengantar Focus Group Discussion*. PKSPL IPB.
- Semedi, P. (2002). *Close to the stone, far from the throne: The story of a Javanese community 1820s–1990s*. Yogyakarta: Benang Merah.
- Ritzer, G., & Goodman, D.J. (2004). *Sociological Theory*. New York: McGraw-Hill.
- Ruben, B.D. (1992). *Communication and Human Behavior*. New Jersey: Prentice Hall.
- Ryan J.M. (2010). Usiang the Theory Planned Behavior to Predict Gambling Behavior. *Journal Psychology of Addictive Behavior*, 24(1), 89–98. www.proquest.pqd/web.
- Saifuddin, A. (2003). *Reliabilitas dan Validitas*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salkind, N.J. 1985. *Theories of Human Development*. New York. John Willey and Sons. Inc.

Sarwono. S.W. (2002). Psikologi Sosial: Individu dan Teori-teori Psikologi Sosial. Jakarta: Balai Pustaka.

Seen, C.Y. (2001). Predictor of intention to use condoms among university women: an application and extension of the theory planed behavior, *Canadian Journal of Behavior Science*, 33(2), 103-117. www.proquest.pqd/web.

Seymour-Smith, C. (2000). Macmillan Dictionary of Anthropology. New York: Macmillan Reference Books.

Tridoyo, K. (2004), Menggugat Revolusi Biru dalam Sinar Harapan. Sinar Harapan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

Undang-undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.